

Implementasi Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar

Haifa Auliya Rahma¹, Novianti², Aini Qolbiyah³, Feri Firmansyah⁴, Nurdin⁵
^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia,
Indonesia
e-mail: haifaaul@upi.edu¹, novianti27@upi.edu², ainiqolbiyy523@upi.edu³,
feri13firmansyah@upi.edu⁴, nurdin_adpen@upi.edu⁵

Abstrak

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan pendekatan transformatif dalam sistem pendidikan Indonesia, yang bertujuan untuk mendorong lingkungan belajar yang lebih fleksibel, inklusif, dan berpusat pada peserta didik. Studi ini mengidentifikasi tantangan dan peluang seputar implementasi kebijakan ini, dengan fokus pada perspektif pendidik dan kesiapan institusi. Dengan menggunakan metodologi tinjauan pustaka sistematis, analisis teori dasar digunakan untuk mengungkap kesenjangan dan mengusulkan intervensi strategis. Temuan penelitian mengungkapkan tantangan yang signifikan, termasuk kesiapan guru yang terbatas, kesenjangan dalam fasilitas pendidikan, beban administratif, dan implementasi yang tidak merata karena koordinasi yang tidak memadai antara otoritas pusat dan daerah. Selain itu, masalah akses teknologi, terutama di daerah terpencil, menghambat efektivitas kebijakan. Terlepas dari tantangan ini, Merdeka Belajar menunjukkan potensi substansial dalam memberdayakan guru, meningkatkan keterlibatan siswa, dan mengurangi beban kurikulum. Reformasi utama meliputi penyederhanaan kurikulum, mengganti sistem ujian nasional dengan penilaian yang lebih berbasis kompetensi, dan memberikan otonomi kepada pendidik dalam perencanaan pelajaran. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi Merdeka Belajar yang sukses memerlukan pelatihan berkelanjutan bagi guru, peningkatan infrastruktur, strategi inklusif untuk menjembatani kesenjangan regional, dan kolaborasi yang kuat di antara para pemangku kepentingan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan pendidikan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan di Indonesia, yang membuka jalan bagi sistem pendidikan yang lebih adil dan berfokus pada mutu.

Kata kunci: *Merdeka Belajar, Kebijakan Pendidikan, Implementasi*

Abstract

The “Merdeka Belajar” policy represents a transformative approach in Indonesia’s education system, aimed at fostering a more flexible, inclusive, and learner-centered learning environment. This study identifies the challenges and opportunities surrounding the implementation of this policy, focusing on educators’ perspectives and institutional readiness. Using a systematic literature review methodology, grounded theory analysis was employed to uncover gaps and propose strategic interventions. Findings reveal significant challenges, including limited teacher preparedness, disparities in educational facilities, administrative burdens, and uneven implementation due to inadequate coordination between central and regional authorities. Additionally, technological access

issues, particularly in remote areas, hinder the policy's effectiveness. Despite these challenges, Merdeka Belajar demonstrates substantial potential in empowering teachers, enhancing student engagement, and reducing curriculum burdens. Key reforms include curriculum simplification, replacing the national examination system with more competency-based assessments, and providing autonomy to educators in lesson planning. The study concludes that successful implementation of Merdeka Belajar requires continuous training for teachers, improved infrastructure, inclusive strategies to bridge regional disparities, and robust collaboration among stakeholders. This research contributes to the development of effective, adaptive, and sustainable educational policies in Indonesia, paving the way for a more equitable and quality-focused education system.

Keywords : *Merdeka Belajar, Education Policy, Implementation*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan telah menjadi prioritas utama, terutama dengan diluncurkannya kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan proses belajar yang lebih fleksibel, inovatif, dan berpusat pada kebutuhan peserta didik (Rosa, 2024). Namun, penerapan kebijakan tersebut menghadirkan tantangan kompleks yang memunculkan kegelisahan akademik dalam berbagai aspek implementasi.

Salah satu persoalan mendasar dalam implementasi Merdeka Belajar adalah kesiapan tenaga pendidik. Banyak guru di berbagai jenjang pendidikan mengaku belum sepenuhnya memahami konsep dan esensi Merdeka Belajar, terutama dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan paradigma baru ini. Hal ini diperparah oleh kurangnya pelatihan yang komprehensif, sehingga implementasi kebijakan sering kali bersifat formalitas tanpa mengubah pola pembelajaran secara optimal (Rahayu, 2023).

Selain itu, disparitas fasilitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan turut memperburuk situasi. Kurangnya akses terhadap teknologi, seperti internet dan perangkat pendukung, menjadi hambatan besar, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. Hal ini bertentangan dengan salah satu fokus utama kebijakan, yaitu mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran (Prayudi, 2024).

Masalah lain yang kerap muncul adalah beban administratif yang masih terlalu tinggi bagi guru. Padahal, salah satu tujuan Merdeka Belajar adalah memberikan keleluasaan bagi guru untuk berinovasi dalam pembelajaran. Beban administratif yang berlebihan justru menghambat guru untuk fokus pada pengembangan kualitas pembelajaran (Zamjani dkk, 2020). Keberlanjutan kebijakan ini juga menjadi sorotan. Kebijakan pendidikan di Indonesia sering kali tidak memiliki koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga implementasinya tidak merata. Beberapa sekolah mampu mengadopsi kebijakan ini dengan baik, sementara yang lain masih mengalami kendala besar dalam pelaksanaannya (Hendrik, 2024).

Salah satu kendala lain dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar adalah minimnya komunikasi yang optimal antara pemerintah, dinas pendidikan, dan pihak sekolah. Hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi di kalangan pemangku kepentingan, sehingga tujuan utama

kebijakan tersebut tidak dapat direalisasikan sepenuhnya (Noor & Rahmatillah, 2020). Meskipun begitu, Merdeka Belajar menyimpan potensi besar untuk menciptakan perubahan signifikan dalam sistem pendidikan. Dengan dukungan berupa pelatihan yang berkesinambungan dan penyediaan fasilitas yang memadai, kebijakan ini diyakini mampu mendorong peserta didik untuk lebih kreatif dan mandiri. Namun, tanpa adanya strategi pelaksanaan yang jelas, terarah, dan adaptif, kebijakan ini berpotensi hanya menjadi slogan tanpa menghasilkan dampak nyata di lapangan (Mulyono, 2022).

Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang muncul dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar, terutama dari sudut pandang tenaga pendidik dan lembaga pendidikan. Penelitian ini berupaya mengkaji akar permasalahan serta strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung kesuksesan kebijakan ini. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia agar lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode studi literatur terkait implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar. Studi literatur melibatkan serangkaian aktivitas, termasuk pengumpulan data dari sumber pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2014). Studi literatur merupakan kajian teoritis dan analisis referensi yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial tertentu yang menjadi objek penelitian (Mulyono & Sulis, 2022).

Untuk menganalisis berbagai kajian yang membahas implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi aspek teoretis utama sekaligus menyoroti karakteristik penting dari publikasi yang relevan. Analisis literatur ini didasarkan pada grounded theory sebagaimana diusulkan oleh Thornberg, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan di lapangan dan mengembangkan model teoretis dari temuan yang dihasilkan. Proses tinjauan literatur ini mengikuti lima tahapan yang diusulkan Thornberg Tahap pertama adalah mendefinisikan kriteria inklusi dan eksklusi artikel, bidang studi yang relevan, database yang digunakan, serta istilah-istilah pencarian yang sesuai. Setelah itu, dilakukan pencarian literatur secara efektif dan pemilihan artikel berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Proses ini memastikan bahwa data yang digunakan mendukung analisis yang mendalam dan komprehensif terkait implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar (Thornberg & Dunne, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu elemen utama dalam membangun suatu bangsa. Tingkat kualitas sistem pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1), pendidikan didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensinya secara aktif (Husaini, 2024). Melalui pendidikan, diharapkan peserta didik dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Yuliah, 2020). Kebijakan pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan arah dan kualitas sistem pendidikan di suatu negara.

Dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan tersebut, kebijakan pendidikan memegang peranan penting sebagai penentu arah dan kualitas sistem pendidikan. Tujuan utama implementasi kebijakan adalah memberikan arah yang jelas agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Dalam konteks kebijakan pendidikan, proses implementasi mencakup penerapan kebijakan di lapangan, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta evaluasi untuk memastikan kebijakan berjalan efektif (Yuliah, 2020). Di Indonesia, kebijakan pendidikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam sekaligus menjawab tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan era informasi. Salah satu kebijakan yang tengah menjadi sorotan adalah program Merdeka Belajar, yang bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masa kini. Program Merdeka Belajar dihadirkan untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi dunia pendidikan, seperti beban kurikulum yang dianggap terlalu berat, kesenjangan mutu pendidikan antar daerah, serta rendahnya keterlibatan peserta didik dalam proses belajar. Kebijakan ini memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah dan guru, sehingga diharapkan dapat memicu kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran (Mulyasa, 2021).

Kebijakan pendidikan memiliki lima komponen utama yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah tujuan (goal), yang merupakan hasil yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini menjadi langkah awal dalam merancang suatu kebijakan atau program. Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas agar pelaksanaannya terarah. Selain itu, tujuan tersebut perlu dirancang secara rasional agar dapat diterima oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Komponen kedua adalah rencana (plans). Setelah tujuan dirumuskan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana kerja yang lebih spesifik untuk mencapainya. Rencana ini menjadi panduan dalam proses manajemen dan implementasi kebijakan pendidikan, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan secara terstruktur dan terorganisasi dengan baik.

Selanjutnya, terdapat komponen program (programme), yang merupakan tahap implementasi konkret dari rencana yang telah disusun. Program terdiri dari aktivitas nyata seperti proyek-proyek yang dirancang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam proses pengembangan kebijakan pendidikan, penting untuk menyusun beberapa alternatif program yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Komponen keempat adalah keputusan (decision), yaitu tindakan yang diambil untuk menetapkan tujuan, menyusun rencana, melaksanakan program, dan mengevaluasi pelaksanaannya. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis dari berbagai alternatif kebijakan. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada rasionalitas agar dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Terakhir adalah dampak (effects), yaitu pengaruh yang timbul sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dampak ini dapat berupa dampak utama (primer) maupun tambahan (sekunder), serta bisa bersifat positif maupun negatif. Selain itu, dampak juga bisa terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja, tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan. Kelima komponen ini saling mendukung satu sama lain, sehingga menciptakan kebijakan pendidikan yang efektif dan terarah. Tanpa salah satu dari komponen ini, kebijakan

pendidikan tidak dapat berjalan dengan optimal, karena semua komponen tersebut merupakan fondasi yang saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan (Elwijaya dkk, 2021).

Merdeka Belajar

Merdeka Belajar merupakan upaya transformasi dalam bidang pendidikan yang diidentifikasi sebagai arah kebijakan dan strategi yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dijelaskan dalam Rencana Strategis 2020-2024. Konsep Merdeka Belajar yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan dunia pendidikan dengan tuntutan era globalisasi dan digitalisasi. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menjelaskan bahwa konsep ini dirancang untuk memungkinkan peserta didik mendalami minat dan bakat masing-masing. Sebagai contoh, apabila terdapat dua anak dalam satu keluarga dengan minat yang berbeda, tolok ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan mereka tidak akan sama, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan individual masing-masing (Munawar, 2022).

Merdeka Belajar bertujuan menciptakan suasana belajar yang bahagia dan mendukung baik untuk peserta didik maupun guru. Latar belakang peluncuran program ini adalah berbagai keluhan dari orang tua terhadap sistem pendidikan nasional yang diterapkan selama ini, termasuk nilai ketuntasan minimum yang berbeda-beda pada setiap mata pelajaran. Konsep ini berupaya menjawab permasalahan tersebut dengan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam proses pembelajaran (Sherly dkk, 2021).

Program Merdeka Belajar menjadi langkah terobosan dari Kemendikbud untuk mendorong kemajuan pendidikan di Indonesia. Gagasan ini tidak hanya inovatif, tetapi juga menghadirkan tantangan besar bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Dalam kerangka ini, Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan peserta didik untuk berinovasi, berkreasi, serta bertindak lebih mandiri (Syafi'i, 2022). Program ini juga mencakup empat kebijakan utama. Pertama, penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) diganti dengan asesmen yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing, memberikan otonomi lebih kepada institusi pendidikan. Kedua, Ujian Nasional (UN) yang sebelumnya menjadi indikator utama kelulusan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Ketiga, guru diberikan kebebasan untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan format yang lebih fleksibel. Keempat, peraturan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi diubah menjadi lebih adaptif untuk menyesuaikan dengan kondisi daerah (Wijaya dkk, 2020).

Salah satu implementasi penting dalam program Merdeka Belajar adalah penyederhanaan kurikulum. Kurikulum baru ini berfokus pada kompetensi esensial yang benar-benar diperlukan oleh peserta didik, bukan lagi pada pencapaian kompetensi yang terlalu banyak (Anggraena dkk, 2022). Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban belajar yang berlebihan dan memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif secara lebih mendalam. Dalam konteks ini, penyederhanaan kurikulum menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dengan fleksibilitas dan kebebasan yang ditawarkan, Merdeka Belajar diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan pendidikan di Indonesia, seperti ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, rendahnya partisipasi aktif

peserta didik dalam proses belajar, dan beban kurikulum yang terlalu berat. Melalui kebijakan ini, diharapkan muncul pendekatan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini dan masa depan, sekaligus menjadikan sistem pendidikan Indonesia lebih inklusif dan adaptif.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar

Implementasi kebijakan pendidikan Merdeka Belajar merupakan wujud nyata reformasi sistem pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih fleksibel, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta tantangan zaman. Program ini menekankan pentingnya kebebasan bagi sekolah, guru, dan peserta didik dalam menjalankan proses pembelajaran, dengan harapan dapat memicu inovasi, kreativitas, dan keberanian untuk beradaptasi dengan perubahan (Susanti dkk, 2023). Salah satu langkah awal dalam implementasi Merdeka Belajar adalah penyederhanaan kurikulum yang mengedepankan kompetensi esensial dibandingkan dengan beban kurikulum yang terlalu berat. Pendekatan ini bertujuan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif (4C) (Khasanah dkk, 2023). Kurikulum ini juga mendorong guru untuk fokus pada pengajaran berbasis proyek (*project-based learning*) yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik tidak hanya memahami materi tetapi juga mampu mengaplikasikannya (Alhayat, 2023).

Selain penyederhanaan kurikulum, perubahan signifikan lainnya dalam kebijakan ini adalah transformasi sistem evaluasi peserta didik. Ujian Nasional (UN), yang sebelumnya menjadi tolok ukur utama kelulusan, telah digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter. AKM mengukur kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, sementara Survei Karakter menilai sikap, nilai-nilai, dan perilaku peserta didik. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem evaluasi yang lebih adil, fleksibel, dan berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik (Misbah, 2022).

Di sisi lain, kebijakan ini juga memberikan kebebasan kepada guru untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Guru tidak lagi diwajibkan mengikuti format yang kaku, sehingga dapat lebih fokus pada kreativitas dalam proses pembelajaran (Fathoni, 2022). Pendekatan ini diyakini mampu memberdayakan guru untuk menjadi penggerak perubahan di sekolah masing-masing. Sebagai pendukung, program seperti Guru Penggerak telah diluncurkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kebijakan ini (Widyastuti, 2022).

Namun, implementasi Merdeka Belajar tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah disparitas kualitas pendidikan antar daerah. Sekolah-sekolah di wilayah terpencil seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan akses terhadap pelatihan guru, yang dapat menghambat penerapan kebijakan ini secara optimal (Hendrik, 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif dan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi kesenjangan ini.

Selain itu, kebijakan ini juga memerlukan dukungan teknologi yang memadai, terutama di era digitalisasi. Pandemi COVID-19 telah menjadi momen penting dalam percepatan integrasi teknologi dalam pendidikan. Namun, masih banyak sekolah di Indonesia yang menghadapi kendala akses terhadap internet dan perangkat pembelajaran digital. Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus

mengembangkan infrastruktur teknologi pendidikan untuk memastikan implementasi kebijakan ini dapat berjalan secara merata di seluruh Indonesia (Andiyanto, 2021).

Secara keseluruhan, kebijakan Merdeka Belajar adalah langkah strategis yang memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dengan penyederhanaan kurikulum, transformasi sistem evaluasi, pemberdayaan guru, serta dukungan teknologi yang memadai, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan dan adaptif. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, guru, peserta didik, orang tua, maupun masyarakat secara luas.

Dampak dan Hasil Implementasi Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar membawa dampak signifikan, terutama dalam mengurangi beban administratif yang sebelumnya dirasakan oleh para guru. Kebijakan ini memberikan keleluasaan kepada guru untuk menetapkan tujuan pembelajaran, memilih metode yang sesuai, serta merancang aktivitas belajar yang relevan dan inovatif. Hal ini secara efektif mengurangi tekanan administratif yang sebelumnya mengharuskan guru memenuhi berbagai persyaratan yang rumit dan menyita waktu. Akibatnya, guru dapat lebih fokus pada tugas utama mereka, yakni merencanakan, mengajar, dan membimbing peserta didik, sehingga kualitas pengajaran meningkat. Pengurangan beban administratif ini juga berkontribusi pada peningkatan motivasi dan kepuasan kerja guru, yang pada akhirnya berpotensi mendukung kualitas pendidikan secara keseluruhan (Simanjuntak dkk, 2023).

Dampak lainnya terlihat pada peningkatan keterlibatan dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Melalui kebijakan ini, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi minat belajar mereka dan berperan aktif dalam menentukan jalur pendidikan yang paling sesuai. Kebebasan ini menciptakan rasa kepemilikan terhadap proses pembelajaran, yang pada gilirannya meningkatkan semangat peserta didik untuk mengikuti kelas, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat. Peningkatan keterlibatan peserta didik berdampak positif pada kualitas pembelajaran, karena mereka menjadi lebih fokus, berani mengambil risiko dalam eksplorasi ide, dan termotivasi untuk mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Selain itu, dengan diberdayakan dalam proses pembelajaran, peserta didik juga mengembangkan sikap positif terhadap pendidikan dan lebih terdorong untuk meraih prestasi yang lebih baik (Lembong dkk, 2023).

Peningkatan kualitas interaksi antara guru dan peserta didik, yang menjadi salah satu hasil dari implementasi kebijakan ini, juga memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (Hirzulloh, 2024). Ketika guru memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk memahami kebutuhan serta potensi peserta didik, hubungan yang lebih dekat dan saling mendukung dapat terjalin. Hal ini menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan, yang pada akhirnya mendorong peserta didik untuk lebih percaya diri dan aktif dalam belajar. Dengan kebijakan ini, baik guru maupun peserta didik dapat bersama-sama menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan berkelanjutan.

Hasil penelitian tentang penerapan kemerdekaan belajar, menunjukkan bahwa pelaksanaannya cukup baik. Peserta didik dilatih untuk meningkatkan kemampuan kognitif mereka dengan efektif. Selain itu, implementasi kemerdekaan berinovasi berjalan dengan baik, di mana mahapeserta didik mampu menghasilkan ide-ide baru dan karya inovatif, seperti membuat video

presentasi tugas yang diunggah ke YouTube. Hal ini menunjukkan bahwa kemerdekaan berinovasi perlu terus dipertahankan dalam proses pembelajaran (Priana, 2020). Belajar secara mandiri dan kreatif juga diterapkan dengan baik, membantu peserta didik meningkatkan kemampuan berpikir mereka secara signifikan. Dengan demikian, pendekatan belajar mandiri dan kreatif perlu dijaga untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas.

Kebijakan Merdeka Belajar memberikan dampak positif terhadap motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan adanya kebebasan untuk menentukan cara belajar yang sesuai, peserta didik merasa memiliki kendali lebih besar atas proses pendidikan mereka. Peserta didik yang aktif terlibat dalam pembelajaran cenderung memiliki tingkat motivasi yang lebih tinggi. Mereka lebih antusias belajar ketika dapat memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing (Trisnani dkk, 2024). Selain itu, kebijakan ini turut mendorong peserta didik untuk berkolaborasi dan berinteraksi secara aktif. Dalam lingkungan belajar yang lebih fleksibel, mereka diajak untuk bekerja sama melalui proyek atau kegiatan kelompok. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat keterampilan sosial, tetapi juga memungkinkan peserta didik saling berbagi pengetahuan. Kolaborasi antar peserta didik mampu memperkaya pengalaman belajar serta memperdalam pemahaman terhadap materi yang dipelajari (Lestari dkk, 2023).

Salah satu tujuan utama dari kebijakan Merdeka Belajar adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang kurang beruntung. Fleksibilitas dalam pendekatan pembelajaran memungkinkan peserta didik dengan berbagai kemampuan untuk belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki peluang yang sama dalam mengembangkan potensi mereka (Saragih & Marpaung, 2024).

Kebijakan Merdeka Belajar telah membawa dampak yang cukup luas terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi, seperti kesenjangan akses teknologi dan resistensi dari beberapa pihak, kebijakan ini telah memberikan arah yang jelas untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan relevan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat, untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan program ini agar memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta didik dan masa depan pendidikan di Indonesia.

SIMPULAN

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah strategis yang dirancang untuk mentransformasi sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih fleksibel, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan era globalisasi dan digitalisasi. Dengan mengutamakan penyederhanaan kurikulum, transformasi sistem evaluasi, pemberdayaan guru, dan integrasi teknologi, kebijakan ini bertujuan menciptakan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mendorong inovasi serta kreativitas. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Kesiapan tenaga pendidik yang masih kurang, disparitas fasilitas pendidikan antarwilayah, beban administratif yang tinggi, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala utama. Disparitas akses teknologi dan komunikasi yang belum optimal juga memperburuk implementasi

kebijakan di daerah terpencil. Meski demikian, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dengan dukungan pelatihan guru yang berkesinambungan, penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, dan strategi implementasi yang adaptif, kebijakan Merdeka Belajar dapat menciptakan dampak positif seperti pengurangan beban administratif guru, peningkatan motivasi peserta didik, serta hubungan yang lebih erat antara guru dan peserta didik. Keberhasilan implementasi kebijakan ini bergantung pada komitmen bersama semua pemangku kepentingan untuk menjadikan pendidikan Indonesia lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhayat, A., Mukhidin, M., Utami, T., & Yustikarini, R. (2023). The Relevance of the Project-Based Learning (PjBL) Learning Model with “Kurikulum Merdeka Belajar”. *Dwija Cendekia: Jurnal Riset Pedagogik*, 7(1), 105-116.
- Anggraena, Y., Felicia, N., Eprijum, D., Pratiwi, I., Utama, B., Alhapip, L., & Widiaswati, D. (2022). Andiyanto, T. (2021). Pendidikan dimasa covid-19. *Raih Asa Sukses*.
- Dewantara, S. E. Hendrik. (2024). *Membangun Masa Depan Pendidikan: Inovasi dan Tantangan dalam Sertifikasi Guru di Indonesia*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67-71.
- Fatoni, M. (2022, July). Analisis Pelaksanaan Program Merdeka Belajar di SDN Tanjungsari Terkait Pembelajaran Matematika. *Seminar Nasional Sosial, Sains, Pendidikan, Humaniora (SENASSDRA)*, 1(1), 68-77.
- Hirzulloh, M. F. (2024). Peran Guru Penggerak dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. *Social Science Academic*, 2(1), 175-184.
- Husaini, H. (2024). Penerapan Konsep Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam (PAI) di Madrasah Tsanawiyah. *Jurnal Seumubeuet*, 3(1), 1-10.
- Khasanah, I., Musa, M. M., & Rini, J. (2023, July). Kurikulum Merdeka Belajar melalui Pembelajaran Abad 21 untuk Meningkatkan Kompetensi 4C Peserta didik Madrasah Ibtidaiyah. *Prosiding SEMAI: Seminar Nasional PGMI*, 2, 22-34.
- Lembong, J. M., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Implementasi merdeka belajar sebagai transformasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 765-777.
- Lestari, N. A. P., Kurniawati, K. L., Dewi, M. S. A., Hita, I. P. A. D., Or, M., Astuti, N. M. I. P., & Fatmawan, A. R. (2023). Model-model pembelajaran untuk kurikulum merdeka di era society 5.0. *Nilacakra*.
- Misbah, A. (2022). Studi Analisis Kesiapan Guru Dan Peserta didik Dalam Implementasi Kebijakan Asesmen Kompetensi Minimum Pada Madrasah Ibtidaiyah. *Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1), 221-238.
- Mulyasa, H. E. (2021). *Menjadi guru penggerak merdeka belajar*. Bumi Aksara.
- Mulyono, R., & Sulistyani, F. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Sebagai Sebuah Pilihan Bagi Satuan Pendidikan: Kajian Pustaka. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 8(2), 1999-2019.
- Munawar, M. (2022). Merdeka Belajar. *Jurnal Pedagogy*, 15(2), 137-149.

- Noor, I. H., & Rahmatillah, N. (2020). Inovasi tata kelola sekolah menengah atas dalam implementasi kebijakan merdeka belajar.
- Pratiwi, D., Putra, S., Darwiyanti, A., Nansi, W. S., Saptadi, N. T. S., Perang, B., ... & Alwi, M. (2024). Kebijakan Pendidikan. Sada Kurnia Pustaka.
- Prayana, W., Pudjo, H., Sishadiyati, S., & KW, N. I. (2020). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik (JSEP)*, 1(4).
- Prayudi, S., & Taqiyuddin, M. (2024). Evaluasi Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Agama Islam di SDN 008 Labuhan Papan. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 6(4), 51-60.
- Rahayu, S., Yanuarsari, R., Suwandana, C., Romansyah, R., Farid, M., Supriatna, A., ... & Yasmadi, B. (2023). Kebijakan dan Kinerja Birokrasi Pendidikan. Tohar Media.
- Rosa, E., Destian, R., Agustian, A., & Wahyudin, W. (2024). Inovasi Model dan Strategi Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Journal of Education Research*, 5(3), 2608-2617.
- Saragih, O., & Marpaung, R. (2024). Tantangan dan Peluang: Studi Kasus Penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Mandiri Berubah Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(3), 888-903.
- Sherly, S., Dharma, E., & Sihombing, H. B. (2021, August). Merdeka belajar: kajian literatur. *UrbanGreen Conference Proceeding Library*, 183-190.
- Simanjuntak, R., Elfrianto, E., Yusmidani, Y., & Saragih, V. (2023). Administrasi Tata Kelola dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 2613–2619.
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67.
- Susanti, L., Handriyantini, E., & Hamzah, A. (2023). Guru Kreatif Inovatif Era Merdeka Belajar. Penerbit Andi.
- Syafi'i, F. F. (2022, January). Merdeka belajar: sekolah penggerak. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*.
- Thornberg, R., & Dunne, C. (2019). Literature review in grounded theory. *The Sage Handbook of Current Developments in Grounded Theory*, 206-221.
- Trisnani, N., Zuriyah, N., Kobi, W., Kaharuddin, A., Subakti, H., Utami, A., ... & Yunefri, Y. (2024). Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka. PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Wijaya, A., Mustofa, M. S., & Husain, F. (2020). Sosialisasi program merdeka belajar dan guru penggerak bagi guru SMPN 2 Kabupaten Maros. *Jurnal Puruhita*, 2(1), 46-50.
- Widyastuti, A. (2022). Merdeka Belajar dan Implementasinya: Merdeka GuruPeserta didik, Merdeka DosenMahapeserta didik, Semua Bahagia. Elex Media Komputindo.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.
- Zamjani, I., Solihin, L., Supriadi, T., Ulumuddin, I., Pratiwi, I., Rakhmah, D. N., ... & Waspodo, R. M. (2020). Dampak regulasi terhadap peningkatan mutu pembelajaran.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan (Ketiga)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.